

BAB V

KESIMPULAN

Muhammad Mursi merupakan Presiden Mesir pertama yang berasal dari kalangan sipil dan dipilih secara demokrasi. Muhammad Mursi menang dalam proses pemilihan umum secara demokrasi yang dicalonkan Partai Keadilan dan Kebebasan yang dimana partai tersebut merupakan dari kalangan Ikhwanul Muslimin. Sebelum Mursi menjadi Presiden Mesir, Pemerintahan Mesir dipimpin oleh presiden yang berasal dari kalangan militer, sehingga selama pemerintahan tersebut bentuk kekuasaan negara Mesir lebih mengarah ke otoriter.

Setelah rezim Mubarak terlengserkan, Ikhwanul Muslimin yang selama ini dikesampingkan keberadaannya di Mesir mendirikan partai Freedom and Justice Party (FJP) dan mengikuti Muhammad Mursi sebagai calon presiden di pemilihan umum. Pada Mei 2012, Muhammad Mursi berhasil menang dengan memperoleh hasil suara sebanyak 51,3% dengan total 13.230.131 suara, yang ketika itu juga mengalahkan Shafiq yang hanya mendapatkan perolehan 48,3% atau 12.347.380 suara.

Terpilihnya Muhammad Mursi sebagai Presiden merupakan sejarah awal di negara Mesir, karena Muhammad Mursi dipilih berdasarkan demokrasi dan presiden pertama yang berasal dari kalangan sipil. Akan tetapi, ketika Muhammad Mursi dilantik sebagai presiden. Presiden Muhammad Mursi langsung menghadapi segala macam permasalahan yang telah terjadi ketika masa Hosni Mubarak. Krisis ekonomi merupakan masalah utama di Mesir harus segera diatasi oleh Presiden Muhammad Mursi didukung dengan banyaknya angka pengangguran dan kemiskinan.

Gebrakan pertama Presiden Mursi ialah memastikan stabilitas keamanan dan juga memberikan jaminan kesejahteraan sosial. Presiden Mursi menaikkan tunjangan sosial bagi beberapa kalangan seperti pegawai negeri, pensiunan dan prajurit. Presiden Muhammad Mursi pun mengeluarkan beberapa kebijakan dalam keamanan, BBM dan transportasi. Tidak hanya itu, Muhammad Mursi pun melakukan kunjungan ke luar negeri untuk menampilkan citra negara Mesir dan menarik investasi asing..

Akan tetapi, selama menjadi presiden Mesir kebijakan – kebijakan yang dibuat Muhammad Mursi selalu menuai pro – kontra. Hal tersebut berdampak bagi pemerintahan yang sedang dipimpinnnya. Salah satu kebijakan yang paling menuai banyak penolakan ialah ketika Presiden Mursi mengeluarkan dekrit Presiden pada Juli 2012 dan November 2012. Dalam dekrit tersebut Presiden Muhammad Mursi akan mengaktifkan kembali parlemen yang sebelumnya telah dibekukan oleh pihak militer dan akan adanya pemecatan terhadap Jaksa Agung.

Setelah dekrit tersebut dikeluarkan, Presiden Mursi mengadakan referendum untuk memutuskan konstitusi baru yang dapat menjamin posisi presiden agar tidak mudah dijatuhkan oleh Jaksa Agung. Dalam referendum tersebut masyarakat dituntut dalam berpartisipasi untuk menerima ataupun menolak konstitusi yang baru. Akan tetapi pengesahan tersebut menuai demonstrasi dari berbagai pihak. Pihak – pihak tersebut ialah kelompok liberal, sekular, dan kristen. Mereka menilai bahwa perubahan konstitusi tersebut terlalu dipaksakan.

Dalam setahun masa kepemimpinnya, Presiden Muhammad Mursi mengalami banyaknya masalah dengan adanya pergolakan politik. Terutama dengan adanya pandangan bahwa Presiden Mursi bersikap diskriminatif dengan memilih sebagian besar kursi jabatan pemerintahan

untuk kalangan Ikhwanul Muslimin dan Presiden Muhammad Mursi dinilai tidak memenuhi janji reformasi, perbaikan ekonomi, dan politik. Padahal Muhammad Mursi telah menawarkan kepada pihak oposisi untuk dapat menjabat di kursi pemerintahan negara Mesir, dan juga mengundang pihak oposisi dalam membicarakan kebijakan – kebijakan yang dibuat oleh Presiden Muhammad Mursi. Akan tetapi, tawaran tersebut tidak diterima dan lebih ditolak oleh pihak oposisi.

Tidak hanya mengenai berbagai konflik yang terjadi dan perselisihan paham dengan kelompok oposisi. Terdapat juga beberapa alasan mengapa Presiden Muhammad Mursi dilengserkan, alasan tersebut ialah :

1. Dominansi Ikhwanul Muslimin, hal tersebut telah dijelaskan bahwa Presiden Muhammad Mursi telah membagikan sebagian kursi dalam pemerintahannya kepada kelompok Ikhwanul Muslimin. Padahal kelompok ini merupakan kelompok yang selalu mendapat pengawasan dan ketidaksukaan pada sebagian rakyat Mesir sejak kepemimpinan terdahulu.
2. Memburuknya ekonomi, memburuknya ekonomi Mesir ditandai dengan adanya penurunan beberapa defisit anggaran Mesir serta angka pertumbuhan ekonomi yang menjadi 2,2% dari 5,1%.
3. Dekrit Presiden 22 November, banyaknya pertentangan mengenai isi dekrit tersebut membuat kedudukan Presiden Muhammad Mursi melemah, meskipun dalam referendum yang digelar setelah dekrit tersebut dikeluarkan banyak yang setuju dengan konstitusi baru. Hal itu tidak membuat Presiden Muhammad Mursi dalam kedudukan yang aman.
4. Pelanggaran Demokrasi dan HAM, dalam hal ini Presiden Muhammad Mursi dinilai gagal dalam melakukan reformasi dalam sektor keamanan.

Tidak hanya pra kondisi dalam negeri yang menjadi alasan mengapa Presiden Muhammad Mursi harus dilengserkan, akan tetapi ada faktor lainnya yang mendukung penolakan Muhammad Mursi tetap menjadi presiden. Hal tersebut dikarenakan adanya keterlibatan pihak asing yang ikut mendukung terjadinya kudeta tersebut.

Pihak asing yang ikut terlibat dalam usaha tersebut ialah Amerika Serikat dan Arab Saudi. Alasan Amerika Serikat dan Arab Saudi melengserkan Presiden Muhammad Mursi ialah karena adanya kepentingan nasional negara Amerika Serikat dan Arab Saudi terhadap Negara Mesir. Amerika Serikat mengkhawatirkan akan adanya putusannya kerja sama antara Amerika Serikat dengan Mesir, melihat pemerintahan negara Mesir saat itu didominasi dari kalangan partai Islam. Hal tersebut dilihat Amerika Serikat sebagai ancaman hal tersebut dikarenakan Amerika Serikat mempunyai pandangan Islamophobia.

Sedangkan harapan Saudi adalah agar Ikhwanul Muslimin tidak menjadi ancaman dan bekerja sebagai sekutu bawahan dalam urusan bilateral dan regional. Selanjutnya, penguasa Arab Saudi tidak membiarkan nilai-nilai ideologis IM dan demokrasi berkembang di lingkungan Arab yang pengaruh itu muncul akibat pergesaran politik ke arah demokrasi dari Ikhwanul Muslimin yang dapat menyebabkan tuntutan serupa apa yang telah terjadi di Mesir bisa terjadi di Arab Saudi.